



Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan Studi Kasus Desa Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan

Analysis of Poverty Reduction through the Family Hope Program Case Study of Ladang Tuha Village, Meukek District, South Aceh Regency

^{1)*} Nurjalia, ²⁾ Leli Putri Ansari

^{1,2,*)}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi,
Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Indonesia

Email: ^{1)*} nurjalianurjalia@gmail.com ²⁾ leli.putri.ansari@gmail.com

*Correspondence: Nurjalia

DOI:

10.36418/comserva.v2i5.262

Histori Artikel:

Diajukan : 29-09-2022

Diterima : 01-09-2022

Diterbitkan : 15-09-2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan studi kasus Desa Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dimana data diperoleh dari hasil wawancara. Adapun yang menjadi populasi adalah masyarakat penerima bantuan PKH di Desa Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 49 orang yang terdiri dari 21 KK dan jumlah sampel diambil seluruh dari total populasi. Penarikan sampel menggunakan total sampling dimana semua populasi dijadikan sampel. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PKH di Desa Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan bahwa efektif namun kriteria penerima PKH pada tahun sebelumnya di Desa Ladang Tuha lebih bervariasi yaitu ibu hamil, lansia, dan disabilitas. Sedangkan pada tahun 2022 hanya balita dan anak sekolah yang mendapatkan PKH. Jumlah uang PKH keluar tidak tepat waktu. Kartu Keluarga Sejahtera sering kali terblokir dengan sendirinya sehingga penerima PKH tidak dapat menarik uang sampai dua kali penarikan baru bisa menarik uang kembali peserta PKH harus melapor ke pengurus PKH tingkat kecamatan untuk dapat di Unblok kembali oleh pihak pengurus PKH. Selanjutnya saran yang diberikan adalah diharapkan kedepannya PKH di Desa Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan bahwa uang PKH dapat keluar tepat waktu dan informasi lebih transparan.

Kata kunci: Penanggulangan Kemiskinan; Program Keluarga Harapan (PKH); Desa Ladang Tuha.

ABSTRACT

This study aims to analyze poverty alleviation through the Family Hope Program (PKH) with a case study of Ladang Tuha Village, Meukek District, South Aceh Regency. This research is a descriptive qualitative research using primary data where the data is obtained from interviews. The population is the PKH recipient community in Ladang Tuha Village, Meukek District, South Aceh Regency as many as 49 people consisting of 21 families and the total sample is taken from the total population. Sampling uses total sampling where all the population is sampled. Based on the results of the study, it was shown that PKH in Ladang Tuha Village, Meukek District, South Aceh Regency was effective, but the criteria for PKH recipients in the previous year in Ladang Tuha Village were more varied, namely pregnant women, the elderly, and disabled. Meanwhile, in 2022 only toddlers and school children will receive PKH. The amount of PKH money

did not come out on time. The Prosperous Family Card is often blocked by itself so that PKH recipients cannot withdraw money until two withdrawals are made before being able to withdraw money back. PKH participants must report to the PKH district level administrator to be able to be unblocked again by the PKH management. Furthermore, the advice given is that it is hoped that in the future PKH in Ladang Tuha Village, Meukek District, South Aceh Regency that PKH money can be released on time and information is more transparent.

Keywords: *Poverty Alleviation; Family Hope Program (PKH); Ladang Tuha Village.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan sosial yg banyak terjadi pada negara-negara berkembang keliru satunya Indonesia (Arifin, 2020). Kemiskinan pada dasarnya merupakan bentuk problem yang ada dalam kehidupan rakyat, khususnya dimasyarakat negara berkembang seperti Indonesia. masyarakat dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatannya tak relatif buat memenuhi kebutuhan hayati yang paling pokok mirip pangan, pakaian dan sebagainya. Garis kemiskinan yang menentukan batas minimum pendapatan yang dibutuhkan buat memenuhi kebutuhan pokok. Persentase penduduk miskin di Maret 2021 sebanyak 10,14%, menurun 0,04% poin terhadap September 2020 serta semakin tinggi 0,36% poin terhadap Maret 2020. Upaya yg dilakukan pemerintah pada mengurangi problem yang ditimbulkan oleh kemiskinan galat satunya adalah dengan menghasilkan kebijakan terkait pemberdayaan keluarga miskin, galat satu kebijakannya yaitu membuat acara keluarga harapan (PKH) yg mulai dicanangkan pemerintah Dari tahun 2007. sesuai eputusan Menteri koordinator Bidang Kesejahteraan rakyat 57 selaku koordinator Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No. 31/KEP/MENKO/KESRA.IX/2007 perihal “Tim Pengendalian acara keluarga asa” yg artinya pengembangan sistem perlindungan sosial khususnya dalam hal kesehatan dan pendidikan (Keputusan Menteri ketua Bidang Kesejahteraan masyarakat, No. 31/KEP/MENKO/KESRA/IX/2007).

Tujuan diberlakukannya program keluarga harapan (PKH) pada jangka panjang merupakan buat memutus mata rantai kemiskinan serta menaikkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan tadi sekaligus mendukung pada upaya meningkatkan kecepatan pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MGDs) yg sekarang disebut dengan Sustainable Development Goals (SDGs). terdapat lima komponen SDGs yang secara tidak pribadi akan terbantu oleh PKH, yaitu meliputi: engurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan jender, pengurangan nomor kematian bayi serta balita dan pengurangan kematian mak melahirkan. Secara khusus, tujuan PKH adalah menaikkan akses dan pelayanan pendidikan dan kesehatan, mempertinggi tingkat pendidikan peserta PKH, menaikkan status kesehatan serta gizi makan hamil/nifas dan balita di bawah 5 tahun (Puntorini & Purnomo, 2020). PKH yang digulirkan oleh pemerintah buat semua masyarakat miskin dirasakan juga sang semua masyarakat miskin termasuk Aceh. Provinsi Aceh artinya Provinsi yang terletak diujung barat Indonesia dimana nomor kemiskinan pada Provinsi Aceh mencapai 10,33% di Maret 2021 atau tercatat 834,24 ribu penduduk. sang karena itu provinsi Aceh adalah salah satu diantara provinsi yg menerima bantuan dana program keluarga harapan (PKH).pada tahun 2021 pemerintah Indonesia menyalurkan dana acara bantuan PKH sebanyak 28,3 Triliun kepada pemerintah Aceh menggunakan jumlah penduduk 5.371.532 Jiwa.

Kabupaten Aceh Selatan terletak pada bagian daerah pantai barat selatan, mempunyai jumlah keluarga miskin cukup akbar hal ini ditunjukkan sang data Badan pusat Statistik (BPS) dimana tiga tahun terakhir jumlah penduduk miskin pada Kabupaten Aceh Selatan mencapai 14,01 % di tahun 2018, serta tahun 2019 turun sebagai 13,05 %, lalu angka kemiskinan ini teurs menurun sampai tahun sebanyak 12,83 % di tahun 2020, tetapi tahun 2021 meningkat lebih dari tahun 2019 sebanyak 13,18 %. kondisi kemiskinan ini didasari atas beberapa indikator mirip pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, angka pengangguran, angka lama sekolah, serta Indeks Pembanguna manusia (IPM), buat mengurangi penduduk miskin tadi, maka Pemerintah Aceh dan khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan perlu segera merogoh langkah-langkah strategis pada merumuskan arah kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan pada menaikkan perekonomian dan kesejahteraan hidup masyarakatnya.

Terdapat beberapa taktik yang dilaksanakan buat menurunkan angka kemiskinan pada Kabupaten Aceh Selatan tahun 2022 yang bersumber eksklusif asal APBK diantaranya (a) menekan pengeluaran rakyat melalui kegiatan penyediaan sandang dan makanan, (b) menaikkan pendapatan warga , (c) menaikkan sumber Daya manusia (sdm) melalui aktivitas pelaksanaan pendidikan dan training keterampilan bagi pencari kerja sesuai klaster kompetensi, (d) menekan transaksi ekonomi, (e) menjaga stabilitas pangan, serta akibat mala melalui kegiatan pemberdayaan rakyat pada penganekaragaman konsumsi pangan dan berbasis sumber daya lokal.. Selain itu terdapat beberapa program penanggulangan kemiskinan lainnya yang dilakukan sang pemerintah Kabupaten Aceh Selatan di tahun 2022 bersumber langsung dari APBN yaitu program keluarga asa (PKH), donasi Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan Sosial Tunai (BST), bantuan pribadi Tunai (BLT), bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembinaan Berbasis Kompetensi (UPTYDBLK). salah satu strategi program yang giat dilaksanakan pada penanggulangan kemiskinan pada Kabupaten Aceh Selatan ialah program keluarga harapan (PKH) yg diberikan pada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) menggunakan syarat terpenuhinya kewajiban terkait pendidikan serta kesehatan termasuk Desa Ladang Tuha pada Kecamatan Meukek, sebab desa ini termasuk katagori menggunakan persentase penduduk miskin tertinggi pada Kabupaten Aceh Selatan.

Namun ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan (PKH) sehingga perlu dianalisis yaitu bagaimana akibat dari pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) terhadap kemiskinan menggunakan studi kasus pada Desa Ladang Tuha pada Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

A. Kemiskinan

Kemiskinan secara umum adalah kondisi ketidakmampuan seorang secara ekonomi buat bisa memenuhi baku hidup rata-rata rakyat pada suatu wilayah. kondisi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut ditandai menggunakan rendahnya kemampuan pendapatan seorang buat bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok mirip sandang, pangan serta papan ([Rahman et al., 2019](#)). Faktor penyebab kemiskinan laju pertumbuhan yg tinggi, masyarakat pengangguran meningkat, pendidikan yg rendah, terjadinya bencana alam, dan distribusi pendapatan yg tidak merata ([Itang, 2017](#)). Jenis kemiskinan kemiskinan sempurna, kemiskinan cukup, kemiskinan kultural, serta kemiskinan struktural. dampak kemiskinan meningkatnya kriminalitas pada suatu wilayah, angka kematian meningkat, akses mendapatkan pendidikan tertutup, meningkatnya nomor pengangguran, dan perseteruan yang terjadi pada rakyat akan bermunculan. Cara mengatasi kemiskinan melakukan pembaharuan pada data penduduk, melakukan integrasi penyaluran bansos, mengurangi beban

pengeluaran masyarakat miskin, memberikan bonus pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan mengelola APBN dengan cermat.

Kemiskinan merupakan duduk perkara multidimensi yg ditandai dengan rendahnya homogen-rata kualitas biologi penduduk, pendidikan, kesehatan, gizi anak-anak, dan sumber air minum. Beban kemiskinan sangat dirasakan sang kelompok tertentu seperti perempuan serta anak-anak yg menyebabkan terancamnya masa depan karena kekurangan gizi, rendahnya taraf kesehatan dan pendidikan (Ekardo et al., 2014). berdasarkan Undang Undang No 24 Tahun (2004) mejelaskan kemiskinan ialah kondisi sosial ekonomi seorang. Atau sekelompok orang yg tak terpenuhinya hak hak dasarnya. buat mempertahankan serta menyebarkan kehidupan bermartabat. Kebutuhan dasar ini meliputi pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman, perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi di penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Menurut ada beberapa jenis kemiskinan yang perlu diketahui, yakni: 1. Kemiskinan absolut ialah kemiskinan yg mendeskripsikan individu yang taraf pendapatannya pada bawah garis kemiskinan yang ditetapkan negara. Atau mampu pula diartikan mirip keadaan individu yang penghasilannya tidak cukup buat memenuhi kebutuhan primernya. 2. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yg belum merata menjadi akibatnya belum mampu menjangkau seluruh rakyat. oleh karena itu, di sebagian daerah terdapat penduduknya yang memiliki ketimpangan pendapatan. Meskipun kondisi seseorang penduduk sudah berada pada atas batas garis kemiskinan, tetapi permanen terlihat miskin sebab rata-rata pendapatan penduduk wilayah tersebut lebih tinggi. Maka berasal itu, kemiskinan jenis ini dinamakan kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif juga bisa diartikan menjadi kemiskinan yang asal asal perbandingan antara penduduk serta lingkungannya. 3. Kemiskinan kultural ialah kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan warga yang telah menjadi budaya, baik itu nilai-nilai yang diusung, pemikiran, pula cara kerja. 4. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang asal asal struktur sosial yg tersemat di golongan warga eksklusif serta memungkinkan terjadinya kondisi di mana mereka tidak bisa menggunakan sumber daya yang sebenarnya tersedia buat mereka. Perseteruan kemiskinan tidak hanya menjadi beban bagi masyarakat. tetapi, juga menjadi beban negara atau pemerintah. dalam upaya menekan dan mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi pada Indonesia. Beberapa rancangan terus digencarkan pemerintah. sebagai upaya agar terus mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi hampir setiap tahunnya. berikut daftar cara dan solusi mengatasi kemiskinan, yaitu : menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak untuk warga . Adanya upaya memberikan kontribusi /subsidi di masyarakat kurang mampu terhadap kebutuhan pokoknya. Upaya menaikkan aneka macam fasilitas warga /warga , seperti jalan, listrik, dan lainnya. Penghapusan embargo impor beras. Adanya restriksi pajak serta retribusi daerah yg dapat merugikan usaha lokal maupun orang miskin. Upaya dalam merancang proteksi sosial yang lebih tepat target. Terus melakukan dan menyediakan pinjaman modal atau dana pada masyarakat di wilayah. Mengupayakan mengurangi angka kematian ibu yang melahirkan. Mendirikan forum yg bergerak pada bidang mikro, supaya mampu memberikan manfaat kepada masyarakat setempat. memberikan masyarakat atas hak penggunaan tanahnya demi kesejahteraan rakyat miskin. Terus melakukan perbaiki pendidikan ke seluruh wilayah yang terdapat, tanpa pilih kasih. Terus melakukan upaya untuk meningkatkan fasilitas kesehatan rakyat dimana pun berada. berdasarkan Arsyad (2010) kemiskinan secara garis besar bisa digolongkan menjadi dua aspek, yaitu aspek utama serta aspek sekunder.

Aspek primer merupakan aspek yg berupa miskin aset (harta), organisasi sosial politik, pengetahuan, dan keterampilan. sementara itu, aspek sekunder artinya aspek yang berupa miskin terhadap jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan berita. Kemiskinan pula dapat diartikan suatu syarat sempurna atau relatif pada suatu wilayah pada mana seorang atau kelompok rakyat tidak bisa mencukupi kebutuhan dasarnya sinkron rapikan nilai atau tata cara yg berlaku.

Menurut (Fajri, n.d.) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu problem fundamental, sebab kemiskinan menyangkut pemenuhan kebutuhan yang paling mendasar pada kehidupan dan kemiskinan artinya duduk perkara dunia karena kemiskinan artinya masalah yg dihadapi banyak negara.

Salah satu konflik yg masih dihadapi oleh negara Indonesia yaitu dilema kemiskinan. duduk perkara kemiskinan artinya dilema yg kompleks dan bersifat multidimensional sebagai akibatnya sebagai prioritas pembangunan. Selama ini, pemerintah Indonesia sudah poly memiliki acara-acara buat pengentasan kemiskinan yg terdapat. Upaya pengentasan kemiskinan terdapat 2 seni manajemen yang wajib pada tempuh. Pertama, melindungi keluarga serta grup warga miskin melalui pemenuhan kebutuhan mereka dari banyak sekali bidang. ke 2, melakukan pelatihan di mereka agar memiliki kemampuan untuk melakukan usaha pencegahan terjadinya kemiskinan baru. Upaya pengentasan kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur (Ferezagia, 2018).

B. program keluarga harapan (PKH)

Dari tahun 2007 pemerintah Indonesia sudah melaksanakan program keluarga harapan (PKH) menjadi upaya memberi perlindungan sosial bagi keluarga miskin dan upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian donasi dana tunai bersyarat (Darmadi et al., 2021). program keluarga harapan (PKH) adalah suatu program yang memberikan bantuan tunai untuk rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), Jika mereka 60 memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber Daya manusia (sdm), yaitu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial. Program keluarga harapan (PKH) adalah suatu program penanggulangan kemiskinan (Liahati & Larasati, 2019). Penanggulaan kemiskian lainnya. PKH artinya sebuah model perlindungan sosial berbasis keluarga. Secara konseptual PKH termasuk dalam kategori donasi sosial (social assistance) yaitu program jaminan sosial yang berbentuk tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan pada keluarga rentan yg tidak mempunyai penghasilan yg layak. keluarga miskin, pengangguran, anak-anak, penyandang cacat, lanjut usia, orang memakai kecacatan fisik serta mental, kaum minoritas, yatim piatu, koordinator keluarga tunggal, pengungsi, serta korban permasalahan sosial artinya beberapa contoh kelompok sasaran bantuan sosial (Kemensos, 2013).

Diharapkan dalam jangka pendek PKH mampu membantu keluarga miskin mengurangi beban pengeluaran, sedangkan dalam jangka menengah dibutuhkan PKH bisa menciptakan perubahan sikap peserta pada mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sebagai akibatnya membentuk generasi yg lebih sehat dan cerdas. Selanjutnya pada jangka panjang PKH dibutuhkan bisa memutuskan rantai kemiskinan antar generasi yaitu melalui pertama menaikkan kualitas kesehatan, pendidikan dan pendapatan anak di masa depan. kedua menyampaikan kepastian untuk masa depan anak. Ketiga merubah perilaku keluarga miskin untk menyampaikan perhatian yang besar terhadap pendidikan serta kesehatan anaknya. Keempat mengurangi pekerja anak serta anak jalanan. Menjadi akibatnya PKH

diharapkan bisa berkontribusi secara signifikan buat menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya menaikkan Indeks Pembangunan manusia (IPM).

Adapun PKH diberikan di warga miskin wajib memenuhi kriteria sesuai komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Penerima PKH sesuai kriteria komponen kesehatan mencakup bunda hamil/nifas/menyusui serta anak usia dini usia 0-6 tahun. Sedangkan penerima PKH sesuai kriteria komponen pendidikan mencakup anak usia Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (Mts), Anak Sekolah Menengan Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Anak usia 6-21 tahun yang belum merampungkan harus belajar 12 tahun. Selanjutnya penerima PKH sesuai kriteria komponen kesejahteraan social mencakup lanjut usia mulai 60 tahun ke atas, penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat (Sumbawati et al., 2020).

Penerima PKH tersebut akan menerima bantuan dana tetap setiap bulannya dan akan menerima dana tambahan setiap keluarga sesuai dengan komponen yang mereka miliki (Rahmawati & Kisworo, 2017). Jumlah besaran PKH yang diterima pada tahun 2022 masih disesuaikan menurut indeks dan faktor penimbang bantuan sosial PKH selama penanganan Covid-19 yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Ketentuan Besaran Jumlah Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Kriteria Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan Sosial

No	Komponen	Jenis Katagori Penerima PKH	Besaran Jumlah PKH (Rupiah) per bulan	Besaran Jumlah PKH (Rupiah) per tahun
1	Kesehatan	Ibu hamil/nifas	250.000	3.750.000
		Anak Usia Dini 0-6 tahun	250.000	3.750.000
2	Pendidikan	Anak SD/ sederajat	75.000	1.125.000
		Anak SMP/ sederajat	125.000	1.875.000
		Anak SMA/ sederajat	166.000	2.500.000
3	Kesejahteraan Sosial	Penyandang disabilitas berat	200.000	3.000.000
		Lanjut usia di atas 60 tahun ke atas	200.000	3.000.000

Sumber : Kementerian Sosial Republik Indonesia (2022)

Tabel 1 menunjukkan bahwa besaran jumlah PKH yang diterima berbeda-beda sesuai dengan kriteria komponen dan katagori penerima PKH. Namun selama Pandemi Covid-19 penyaluran dana PKH oleh pemerintah dilakukan setiap bulan yang mulai berlaku sejak bulan april tahun 2020 dibandingkan sebelum Pandemi Covid-19 yang biasanya disalurkan triwulan dan bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 (empat) orang dalam satu keluarga.

C. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu pengukuran terhadap sejauhmana pelaksanaan PKH dalam memberi kontribusi untuk membantu rumah tangga miskin. Atau

dengan istilah lain efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) ini disebutkan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah dirancang sesuai dengan sasaran (Elia & Nusa, 2021).

METODE

Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi kasus yang terjadi di Desa Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan dan dilakukan selama 6 (enam) pada bulan Januari-Juni tahun 2022. Populasi dalam penelitian ini adalah semua penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 49 responden dari 21 KK (Kepala Keluarga). Dimana responden penerima PKH tersebut adalah balita sebanyak 7 orang, anak pendidikan SD sebanyak 19 orang, Anak pendidikan SMP sebanyak 10 orang dan anak pendidikan SMA sebanyak 13 orang. Karena jumlah populasi sangat minim sehingga jumlah sampel diambil secara keseluruhan dari total populasi dengan menggunakan teknik penarikan sampel yaitu total sampling. Selanjutnya penelitian ini akan dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif yang diperoleh dari hasil pengolahan data primer melalui wawancara dengan penerima dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menganalisis penanggulangan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan keluarga sebagai manfaat dari penerimaan dana bantuan PKH tersebut sehingga berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai jenis pekerjaan dan pendapatan kepala keluarga penerima PKH sehingga tergolong keluarga miskin atau tidak dengan demikian keluarga tersebut layak atau tidak layak menerima bantuan dana PKH. Berikut ini dijelaskan gambaran mengenai karakteristik responden.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan Kepala Keluarga Penerima PKH Tahun 2022 di Desa Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan

No	Jenis Pekerjaan Kepala Keluarga	Responden (orang)	Persentase (%)
1.	Tani	9	42,86
2.	Nelayan	3	14,29
3.	Kuli Bangunan	5	23,81
4.	Agen Pala	1	4,76
5.	Penjual Ikan Keliling	2	9,52
6.	Tunanetra	1	4,76
	Total	21	100

Sumber : Hasil Wawancara (data Primer)

Berdasarkan Tabel 2 di atas bahwa jenis pekerjaan kepala keluarga penerima PKH di Desa Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan banyak berkerja sebagai petani yaitu

sebanyak 9 orang (42,86%) dan sisanya bekerja sebagai kuli bangunan sebanyak 5 orang (23,80%), nelayan sebanyak 3 orang (14,29%), penjual ikan keliling sebanyak 2 orang (9,52%) dan agen pala sebanyak 1 orang (4,76%) dan tunanetra 1 orang (4,76%).

Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan Kepala Keluarga Penerima PKH Tahun 2022 di Desa Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan

No	Pendapatan Kepala Keluarga Penerima PKH (Rupiah)	Responden (Orang)	Persentase (%)
1.	≤ 500.000	1	4,76
2.	600.000 - 1.000.000	6	28,57
3.	1.100.000 - 1.600.000	6	28,57
4.	1.700.000 - 2.000.000	8	38,10
5.	≥ 2.100.000	0	0
Total		21	100

Sumber : Hasil wawancara (data primer)

Tabel 3 menjelaskan bahwa pendapatan per bulan kepala keluarga penerima PKH di Desa Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan mempunyai pendapatan bervariasi mulai dari Rp.500.000 – Rp 2.000.000. Hal inilah dasar terpilihnya sebagai penerima PKH yang tergolong keluarga sangat miskin.

Selanjutnya kriteria keluarga miskin selain ditinjau dari pendapatan kepala keluarga juga dapat ditinjau dari pengeluaran konsumsinya (Harahap, 2021). Seandainya pendapatan lebih besar dari pengeluaran konsumsi kemungkinan keluarga tersebut dapat menyisihkan pendapatannya dalam bentuk tabungan. Namun sebaliknya jika pengeluaran konsumsi lebih besar dari pada pendapatannya maka keluarga tersebut akan terlilit hutang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pengeluaran Konsumsi Kepala Keluarga Penerima PKH Tahun 2022 di Desa Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan.

No	Pengeluaran Konsumsi Kepala Keluarga Penerima PKH (Rp)	Responden (orang)	Persentase (%)
1.	500.000 – 1.000.000	6	28,57
2.	1.100.000 – 1.600.000	7	33,33
3.	1.700.000 – 2.200.000	8	38,010
4.	≥ 2.300.000	0	0
Total		21	99,91

Sumber : Hasil wawancara (data primer)

Berdasarkan Tabel 4 di atas bahwa pengeluaran konsumsi kepala keluarga penerima PKH di Desa Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan rata-rata Rp.500.000 - Rp.2.000.000. Jika dibandingkan antara pendapatan kepala keluarga dengan pengeluaran konsumsi keluarga maka dapat disimpulkan bahwa seimbang sehingga mereka tidak terlilit hutang walaupun hidup masih jauh dari kekurangan.

B. Pembahasan Penelitian

Hasil wawancara dengan responden menunjukkan bahwa penerima dana bantuan PKH per KK di Desa Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan sebanyak 4(empat) orang anak dan sistem pengambilan dana bantuan PKH menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera dalam bentuk pribadi setiap 3 (tiga) bulan sekali. Adapun besaran jumlah bantuan dana PKH yang diterima oleh penerima PKH berbeda-beda menurut tingkatannya yaitu balita sebesar Rp.250.000/bulan, anak tingkat pendidikan SD sebesar Rp.75.000/bulan, anak tingkat pendidikan SMP sebesar Rp. 120.000/bulan, dan anak tingkat pendidikan SMA sebesar Rp 170.000/bulan.

C. Permasalahan Yang Sering Terjadi Pada Penerima PKH

Adapun permasalahan yang ditemui di lapangan pada penerima PKH antara lain *pertama* jumlah dana bantuan PKH yang diterima tidak menentu dan berbeda-beda pada bulan pertama dengan bulan selanjutnya. *Kedua* adalah kartu ATM sering terblokir dengan sendirinya dan penerima PKH harus melapor ke pihak pengurus PKH untuk didaftar ulang. *Ketiga* jadwal pencairan dana bantuan PKH tidak menentu dan banyak penerima bantuan dana PKH tidak mengetahui dengan pasti jadwal pencairannya karena kurang sosialisasi dan pendamping PKH hanya memberi tahu kepada ketua kelompok PKH.

D. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penanggulangan Kemiskinan

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penanggulangan kemiskinan di Desa Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan yaitu dapat dilihat dari indikator-indikator berikut ini :

- a. Indikator Masukan yaitu tersedianya dana yang cukup dan tersedianya pedoman umum pelaksanaan PKH sehingga dapat dikatakan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah efektif dilaksanakan .
- b. Indikator Proses yaitu adanya verifikasi data penerima dana bantuan PKH oleh pihak pendampingan dan sosialisasi belum maksimal dilakukan sehingga penerima PKH kurang mengetahui informasi sehingga hal ini menunjukkan bahwa kurang efektif.
- c. Indikator keluaran yaitu penyaluran dana bantuan PKH tidak tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan dan jumlahnya juga tidak tetap setiap bulannya sehingga dapat dikatakan kurang efektif.
- d. Indikator Manfaat yaitu dana yang diterima sudah dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan dan kebutuhan kesehatan pendidikan dan oleh penerima PKH sehingga dapat dikatakan bahwa sudah efektif.
- e. Indikator dampak yaitu meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) yang ditandai dengan banyaknya anak yang bersekolah dari pada tidak bersekolah hanya membantu orang tua bekerja dan juga berdampak terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat penerima PKH untuk menggunakan fasilitas pendidikan dan kesehatan untuk mendukung kehidupan mereka.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kemiskinan melalui program keluarga harapan (PKH) efektif. Hasil penelitian ini sinkron sejalan dengan penelitian yg dilakukan oleh peneliti sebelumnya. ([Ekardo et al., 2014](#)) dalam penelitiannya “Efektivitas program keluarga harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir Kabupaten Pesisir Selatan” bahwa program PKH di Nagari Lagan Hilir sudah efektif Bila ditinjau dari tujuan program. namun di sisi lain penetapan target penerima bantuan PKH bagi RTSM di Nagari Lagan Hilir belum

mampu dikatakan efektif penentuan target belum sempurna target, karena masih ditemukan pada lapangan rakyat yang dikategorikan kedalam ekonomi menengah ke atas yang menerima bantuan ini terungkap waktu melakukan pengamatan ke rumah peserta PKH. Dana bantuan PKH bagi RTSM telah meringankan beban pengeluaran, tetapi RTSM masih menduga belum cukup, berdasarkan pengakuan mereka bahwa perlengkapan pendidikan anak-anaknya semua mahal dan tidak mencukupi dengan bantuan yang mereka terima.

Selanjutnya pada penelitian ([Gemiharto & Juningsih, 2021](#)) bahwa permasalahan yang seringkali terjadi terkait bantuan ialah dapat bantuan seringkali tidak tepat waktu sebab banyak hal misalnya masalah verifikasi. Hal itu terjadi sebab mekanisme pencairan bantuan ditentukan oleh pemerintah pusat (Kemensos). Selain itu ditemukan bahwa pengetahuan masyarakat perihal PKH masih kurang, sebagai sehingga proses sosialisasi serta edukasi perlu ditingkatkan. Hasil penelitian ([Sofianto, 2020](#)) tentang “implementasi PKH di Kabupaten Poso” menunjukkan bahwa belum dipahami dengan baik pemanfaatan PKH, sehingga masih banyak penggunaan yang belum tepat sasaran. Kemudian dikemukakan ([Takaredase et al., 2019](#)) secara umum PKH berdampak positif terhadap rumah tangga sangat miskin dalam kesehatan dan pendidikan (aksesibilitas), tetapi belum terhadap status sosial ekonomi (Purwanto et al., 2003). ([Suleman & Resnawaty, 2017](#)) menunjukkan bahwa PKH terbilang tepat jika dilihat dari sudut pandang perlindungan sosial, tetapi belum terukur efektifitas pelaksanaannya. PKH juga belum tepat dilihat sebagai program pengentasan kemiskinan Bila dicermati berasal sudut pandang kesejahteraan sosial. Belum terdapat indikator untuk mengukur perubahan dan peningkatan penerima program, sehingga dikhawatirkan jumlahnya terus bertambah dan tingkat ketergantungan terhadap bantuan menjadi sangat tinggi.

SIMPULAN

Adapun kesimpulannya yaitu : a). Jumlah penerima PKH Desa Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan tahun 2022 berjumlah 49 orang Tingkat balita 7 orang, SD 19 orang, SMP 10 orang, dan tingkat SMA 13 orang dari 21 KK. PKH dapat menekan pengeluaran masyarakat miskin walaupun tidak sepenuhnya dan belum mencapai target yang diinginkan, PKH dapat membantu anak masyarakat miskin dari usia balita hingga mengikuti bangku sekolah, SD, SMP, dan SMA, uang PKH dapat dipergunakan untuk membeli pempes, susu, dan alat lainnya untuk balita agar gizi balita tercukupi, untuk anak yang sudah bersekolah dapat berguna untuk membeli peralatan sekolah seperti seragam sekolah, sepatu, tas, dan alat tulis, dan dipergunakan untuk jajan di sekolah. Anak-anak di Desa Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan semua sudah masuk sekolah, pendidikan sudah merata dan dapat menanggulangi kemiskinan di Desa Ladang Tuha Kecamatan Meukek dengan adanya PKH terhadap anak bersekolah. b). Penerima PKH sudah tepat sasaran dibandingkan dengan tahun yg lalu. c). Koordinasi pendampingan dan pemerintah lokal masih lemah. d). Kurangnya koordinasi pendamping PKH dengan aparatur gampong sebagai perangkat pemerintah lokal setempat dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur gampong tidak tahu tentang program PKH padahal aparatur gampong ikut bertanggung jawab terhadap kesuksesan PKH dan kendala yang terjadi di lapangan. e). Minimnya sosialisasi pencairan dana bantuan. f). Berdasarkan hasil penelitian bahwa tidak ada penetapan jadwal yang pasti setiap bulannya mengenai prosedur pencairan

dan penerimaan uang bantuan PKH. Sehingga peserta penerima PKH tidak mengetahui dengan pasti kapan dana bantuan PKH akan dicairkan hanya menunggu informasi dari ketua kelompok PKH yang diperoleh dari pendamping PKH. Oleh karena perlu adanya transparansi dan sosialisasi mengenai pencairan dana bantuan PKH. g). Jumlah bantuan yang diterima tidak sesuai. h). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dana bantuan PKH yang diterima tidak menentu dan berbeda-beda pada bulan pertama dengan bulan selanjutnya. i). Dengan meneliti peneliti mendapat ilmu dan pemahaman langsung tentang pkh, kriteria penerima pkh, dan manfaat pkh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, J. (2020). Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 6(2), 114–132. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2372>
- Darmadi, D., Yusuf, D. A. P., Firnanda, Y. A. Y., & Nathanie, R. W. (2021). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(5), 806–818. <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i5.226>
- Ekardo, A., Firdaus, F., & Elfemi, N. (2014). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(1), 1–9.
- Elia, F. A., & Nusa, Y. (2021). Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Nawaripi Distrik Wania Kabupaten Mimika. *JURNAL KRITIS (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi)*, 5(1), 15–42.
- Fajri, A. K. (n.d.). Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan. *Gema Publica: Jurnal Manajemen Dan Kebijakan Publik*, 7(1), 158–170. <https://doi.org/10.14710/gp.7.1.2022.158%20-%20170>

^{1*)} **Nurjalia,** ²⁾ **Leli Putri Ansari**

Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Studi Kasus Desa Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan

- Ferezagia, D. V. (2018). Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, 1(1). <https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6>
- Gemiharto, I., & Juningsih, E. R. (2021). Komunikasi pemerintahan dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Tunai di kabupaten Bandung. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 6(1), 1–22.
- Harahap, A. S. (2021). Pengaruh Pendapatan, Jumlah Anggota Keluarga Dan Pendidikan Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Sugai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara. *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.
- Itang, I. (2017). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan. *Tazkiya*, 16(01), 1–30.
- Liahati, L., & Larasati, D. C. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 7(2). <https://doi.org/10.33366/jisip.v7i2.1426>
- Puntorini, S. A., & Purnomo, E. P. (2020). Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Rangka Pengurangan Angka Kemiskinan Di Kabupaten Bantul Tahun 2018. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 7(02), 230–242. <https://doi.org/10.21009/JKKP.072.10>
- Rahman, P. A., Firman, F., & Rusdinal, R. (2019). Kemiskinan Dalam Perspektif Ilmu Sosiologi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(3), 1542–1548. <https://doi.org/10.31004/jptam.v3i3.399>
- Rahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 1(2), 161–169.
- Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia*, 10(1), 14–31.
- Sumbawati, N. K., Asmini, A., Juliawati, H., & Pamungkas, B. D. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ropang. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 8(3), 194–203.

^{1*)} **Nurjalia,** ²⁾ **Leli Putri Ansari**

Analisis Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Studi Kasus Desa Ladang Tuha Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan

Takaredase, J. T., Kaawoan, J. E., & Singkoh, F. (2019). Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kampung Manumpitaeng. *Jurnal Eksekutif*, 3(3).



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).